

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISM KERAKYATAN UNTUK MENCAPAI NEGARA KESEJAHTERAAN

A. Sosialisme Lama dan Modern

Dalam menelaah tentang sosialisme, Sjahrir melihat ada dua bentuk sosialisme yang berkembang secara historis. Pertama, sosialisme pada waktu kapitalisme masih muda (abad ke-19), ketika terjadinya penjajahan dan penghisapan sehingga banyak buruh menderita. Pada fase kapitalisme muda itu, sosialisme merupakan ajaran perjuangan dan perlawanan kaum penindas, dan perjuangan serta perlawanan golongan yang dihisap.⁷⁸ Maka dapat dipahami, sifat dan cirri seorang sosialis adalah memusuhi kaum kapitalis dan yang berkuasa. Keyakinannya adalah perjuangan kelas tanpa belas-kasihan dan segala perhatiannya dipusatkan pada tujuan untuk menggulingkan golongan kapitalis dan golongan berkuasa dari tahtanya, supaya dapat mendirikan kekuasaan kaum proletar dan kaum yang selama golongan yang lain itu berkuasa sama sekali tidak memperoleh keadilan.⁷⁹

Sosialisme yang kedua adalah sosialisme di abad ke-20 yang kemudian Sjahrir mengkualifikasikannya sebagai sosialisme modern. Menurut Sjahrir, sosialisme baru ini telah meninggalkan kepercayaan akan milik pribadi sebagai berhala dan alat gaib untuk mempercepat kemajuan serta kemakmuran manusia.⁸⁰ Walau demikian, sosialisme ini (modern) tetap berjuang untuk menyusun pergaulan

⁷⁸ Sutan Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Jakarta. Lappenas. 1982. Hal. 69

⁷⁹ *Ibid.*, Hal. 70

⁸⁰ *Ibid.*, Hal 71

hidup yang baru yang adil alias anti-kapitalis. Sosialisme ini bukan lagi merupakan suatu ajaran untuk satu golongan saja (proletar). Jadi, sosialisme ini sudah tidak percaya lagi pada diktator proletariat apalagi diktator partai karena segala bentuk diktator termasuk diktator kaum buruh sekalipun atau kelompok lain. Sosialisme ini melawan frontal maksud dasar ajaran Karl Marx yang pada intinya menghendaki suatu masyarakat yang bebas dari penindasan dan penghisapan oleh siapapun serta menghendaki emansipasi seluruh rakyat sehingga tidak tuan dan budak. Sifat dari sosialisme baru ini, menurut Sjahrir adalah sifat kemanusiaannya yaitu kepercayaannya pada persamaan, keadilan serta kesanggupan kerja sama antara sesama manusia sebagai dasar kehidupan didalam pergaulan masyarakat. Sifat sosialisme ini berdasarkan pada kepercayaan akan kesanggupan manusia serta penghargaan dan cinta padanya, dan tidak berdasarkan pada kecurigaan dan kebencian terhadap sesama manusia.⁸¹

Dalam hal ini, Sjahrir menganjurkan suatu perlawanan kaum sosialis yang lain dari pada yang lama. Perlawanan tanpa kekerasan. Dari sinilah tampak sosialisme Sjahrir telah meninggalkan prinsip pertentangan kelas dari Karl Marx yang telah mendominasi scenario sosialisme lama. Dalam konsep pertentangan kelas Karl Marx, menurut Sjahrir adalah pertentangan (antara) kelas majikan kapitalis (penguasa dunia industri) bukan prinsip universal yang berlaku dimana-mana, melainkan faktor historis dalam kurun waktu dan ruang tertentu pada saat pihak yang memiliki alat-alat produksi dan kekuasaan Negara saling berkolusi untuk mengabaikan keadilan dan menghisap kaum buruh.

⁸¹ *Ibid.*

B. Sosialisme di Indonesia

Sejarah sosialisme di Indonesia juga menunjukkan adanya fase pertama tadi, yaitu perjuangan kelas secara radikal revolusioner dalam iklim penjajahan Hindia Belanda. Munculnya Partai Komunis Hindia yang kelak menjadi Partai Komunis Indonesia dengan tokoh-tokoh Seumaun, Tan Malaka, Darsono, Alirachman, Musso dan Alimin yang menerima petunjuk dari Stalin. Dan kemudian, dihancurkan dan dibuang ke Boven Digoel oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka Sjahrir mencatat bahwa, “sesudah hancurnya Partai Komunis Indonesia, cita-cita sosialisme diantara bangsa dan rakyat kita hanya hidup didalam kandungan gerakan kebangsaa. Di dalam gerakan kebangsaan serta kerakyatan berdasarkan ke-Indonesiaan tumbuhlah cita-cita kemerdekaan yang diharapkan akan dapat memungkinkan pembangunan masyarakat baru untuk bangsa kita, dimana tidak ada lagi perbedaan dan pertentangan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang menindas dan yang tertindas, antara yang menghisap dan yang dihisap. Suatu pergaulan hidup yang tak lagi mengenal kelaparan, kemiskinan, kebodohan dan kehinaan. Suatu masyarakat yang adil, aman dan makmur, atas dasar kerja sama seluruh bangsa kita yang selama jaman penjajahan itu boleh dikatakan termasuk golongan yang tidak mempunyai, paling tidak bukanlah golongan kapitalis sebab mereka umumnya adalah golongan kuli. Tidak pula mengherankan bahwa gerakan kemerdekaan, kebangsaan dan kerakyatan dinegeri kita sangat bersifat anti kapitalis selain dari anti penjajahan dan anti imperialisme”.⁸²

Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, situasi berubah radikal. Lahirnya keharusan mengatur bangsa dan Negara yang kemudian memunculkan persoalan

⁸² *Ibid.*, Hal. 74-75

mendasar dalam menentukan strategi untuk menyusun suatu masyarakat serba baru. Sjahrir bertubi-tubi menekankan pembentukan manusia dan masyarakat baru.

Ketika Partai Komunis Indonesia tetap mengacu pada kepentingan blok Uni Soviet dan kemudian sesudah Uni Soviet dan RRC pecah kemudian berpaling ke Beijing, Sjahrir dan Partai Sosialismenya yang kini diberi predikat penasan Indonesia dan terungkap dalam Partai Sosialis Indonesia keluar dari kelompok PKI. Sjahrir kemudian mengatakan bahwa, "sosialisme yang diajarkan oleh Partai kita berlainan sama sekali dengan ajaran komunis-kominform itu. Kita sebaliknya mendasarkan sosialisme untuk Indonesia yang sudah mempunyai Negara dan pemerintahan sendiri pada kesanggupan rakyat dan bangsa kita mewujudkan sosialisme untuk Negara dan masyarakat kita dengan tidak perlu menganggap musuh dan memerangi sebagian besar rakyat kita".⁸³ Disini dapat dilihat bahwa sosialisme Sjahrir sudah meninggalkan prinsip pertentangan kelas.

C. Sosialisme Kerakyatan Sjahrir

Gagasan Sjahrir tentang sosialisme pada dasarnya penggabungan antara dua kata yaitu sosialisme dan kerakyatan. Namun, sosialisme Sjahrir tidak berbeda dengan sosialisme secara umum yaitu suatu paradigma yang mengusung ide pembentukan manusia ideal; bebas, mandiri, rasional (yang menghargai akal), dewasa namun tetap bahu-membahu kepada sesama (kooperatif). Pembentukan manusia yang ideal ini juga disertai dengan ide mengenai diperlukannya Negara untuk tetap

⁸³ *Ibid.*, Hal. 78

menjaga kondisi-kondisi tersebut demi keberlangsungannya.⁸⁴ Dapat dilihat dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa-masa pergerakan nasional, Sjahrir pertama-tama melihat bahwa yang harus dimerdekakan (dibebaskan) lebih dahulu adalah kesadaran manusia-manusia Indonesia. Kesadaran ini bukan hanya untuk merdeka dari penjajahan (sebab hal ini adalah imbas dari suatu hal yang mendasar menurut Sjahrir) tetapi untuk berfikir secara rasional, dewasa dan kritis.⁸⁵ Sikap otonom dalam semua kehidupan juga ditekankan oleh Sjahrir kepada manusia Indonesia; otonom dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya. Menurutnya pula, jika sikap otonom ini nantinya akan benar-benar terwujud, maka kepemimpinan tidak lagi dibutuhkan.⁸⁶ Manusia-manusia seperti ini pula dengan sendirinya kemudian akan memperjuangkan harga dirinya untuk tidak mau ditindas oleh para penjajah.

Sementara, kata “kerakyatan” yang ditambahkan Sjahrir dalam sosialismenya ini ditujukannya sebagai suatu penghayatan dan suatu penegasan bahwa sosialismenya selalu berpegangan pada dan menjunjung tinggi dasar dan azas persamaan derajat manusia.⁸⁷ Sebab pada perkembangannya, terdapat ajaran

⁸⁴ Lebih lengkapnya kalimat yang dinyatakan Sjahrir di sini yakni bahwa sosialisme hendaknya merupakan suatu tingkatan dalam perkembangan masyarakat di mana telah diwujudkan keamanan pribadi yang sebesar-besarnya dan adanya keadilan sosial dan kesempatan yang sama buat setiap orang untuk hidup dan berkembang. Sutan Sjahrir. *Sosialisme Pembangunan Indonesia*. Jakarta. Lappenas. 1982. Hal. 14.

⁸⁵ Maka dari itu, Sjahrir bersama-sama dengan Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia sebab menurut Sjahrir, cara membebaskan manusia dari kungkungan perbudakan baik oleh kolonialisme mau pun feodalisme adalah dengan melakukan pencerahan kesadarannya melalui pendidikan. Rudolf Mrázek. *Sjahrir, Politik dan Pengasingan Di Indonesia*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1996. Hal. 133. Sjahrir dan Hatta kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI).

⁸⁶ Lebih jelasnya dalam Sosialisme, Sjahrir ingin mendewasakan manusia atau mengantarkan manusia kepada kedewasaannya. Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. *Op.cit.*, Hal.100.

⁸⁷ *Ibid.*, Hal. 91

sosialisme yang mengarah pada ajaran totaliterisme,⁸⁸ yaitu sosialisme yang diajarkan oleh Lenin dan Stalin.⁸⁹ Keduanya ini menurut Sjahrir mengajarkan suatu bentuk Negara yang sentralistik (Negara dengan pemerintahan terpusat yang disebut sebagai diktator partai komunis atau diktator proletariat dengan partai tunggal).⁹⁰ Dalam bentuk Negara seperti ini, yang kemudian berdaulat adalah pemerintahannya, bukan rakyatnya. Rakyat sebagai suatu komunitas yang mandiri dan dinamis, maupun rakyat yang terdiri dari individu-individu ini menjadi leyap dihadapan Negara (pemerintah). Tiap-tiap komunitas atau individu yang bersuara lain akan dilibas atas nama kepentingan Negara. Nilai individu dengan kebebasan dan otonominya pun menjadi lenyap karena semua harus mengacu pada aturan-aturan pemerintah (aturan-aturan pemerintah harus menjadi pusat acuan dari segala kegiatan).

Kata “kerakyatan” bagi Sjahrir mempunyai latar belakang tersendiri, yaitu pada pergerakan nasional (saat-saat perjuangan kemerdekaan) Sjahrir melihat benih-benih feodalistik terdapat didalam diri para pemimpin pergerakan. Begitu pula saat kemerdekaan telah dicapai dan upaya pembangunan Indonesia baru tengah dilakukan, para tokoh pergerakan yang telah menjadi pemimpin (menduduki beberapa jabatan kepemimpinan) makin menunjukkan ke”ningratan”nya dengan pola hidup mewah, boros dan bangga pada jabatan tersebut.⁹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, kata “kerakyatan” sebagai landasan penegasan akan kesamaan kesempatan dan kedudukan bagi seluruh rakyat. Istilah rakyat ini dimasukkan sebagai penghormatan yang lebih tinggi terhadap hak-hak rakyat dan bukan penghormatan hanya pada segelintir rakyat

⁸⁸ *Ibid.*, Hal. 27

⁸⁹ *Ibid.*, Hal. 19 dan Hal.21

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 23

⁹¹ *Ibid.*, Hal. 122

yang berstatus priyayi atau pangkas sejenis dalam struktur masyarakat feodalistik. Jauh-jauh hari, Sjahrir bersama Hatta mengangkat konsep “kedaulatan rakyat” dengan mendirikan suatu jurnal yang bernama *Daulat Ra'yat*.⁹²

Sosialisme kerakyatan ini kemudian sering di dengungkan Sjahrir dalam gagasan-gagasan perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sjahrir sendiri mengatakan bahwa pemimpin Negara, memimpin pembangunan, memimpin ekonomi dengan dan dalam semangat sosialisme kerakyatan.⁹³ Pandangan sosialisme kerakyatan ini juga diterapkan Sjahrir ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 17 November 1945. Hal tersebut terlihat dalam beberapa program kabinetnya yang menitik beratkan pada kepentingan kerakyatan. Diantara beberapa program kabinet tersebut adalah menempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan prikemanusiaan,⁹⁴

⁹² Sebuah majalah yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 20 September 1931. Kata Daulat dicetuskan pertama kali oleh Bung Hatta. Menurutnya kata ini haruslah menjadi konsep demokrasi, lebih lengkapnya, Kedaulatan Rakyat (rakyat haruslah menjadi yang berdaulat dan harus diorganisasikan ke dalam komunitas-komunitas yang otonom dan negara haruslah dibangun dari rangkaian komunitas-komunitas ini atas prinsip desentralisasi semaksimal mungkin. Komunitas rakyat otonom yang fundamental haruslah menjadi pusat kekuasaan dari struktur Negara. Rudolf Mrazek, Hal.126.

⁹³ Sutan Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Hal. 115-116.

⁹⁴ Ben Anderson. *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1988. Hal. 229.

D. Strategi Perjuangan Sjahrir

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan untuk mencapai Negara kesejahteraan. Adapun beberapa hal tersebut akan diuraikan secara detail sebagai berikut:

1. Bentuk Negara

Dalam mencapai Negara kesejahteraan sebagai tujuan dari sosialisme kerakyatan, Sjahrir mendukung suatu jalan parlementer dalam mengabdikan pada perkembangan kemanusiaan. Karena itu, ia memusuhi setiap bentuk kekerasan dalam mencapai kekuasaan, seperti dalam bentuk kediktatoran (Diktator Proletariat) dan totaliterisme.⁹⁵ Menurut Sjahrir, kaum sosialisme mempercayai perubahan masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis adalah melalui pertimbangan-pertimbangan (keputusan-keputusan) dalam parlemen. Segala perubahan tentang status pemilikan produksi dapat diupayakan dengan jalan parlementer. Oleh karena itu, menurut Sjahrir kaum sosialis sangat mementingkan semua syarat untuk mementingkan semua syarat untuk mencapai demokrasi parlementer (termasuk demokrasi ekonomi, sosial, politik, dll, melalui kebijakan parlementer).⁹⁶ Sistem parlementer (demokrasi parlementer) menurut Sjahrir merupakan syarat utama untuk mencapai Negara kesejahteraan.

Selain itu, bentuk Negara yang demokratis menurut Sjahrir adalah juga menjamin kebebasan dan kelancaran perusahaan kerakyatan yang berupa, pemerintah didukung oleh keberadaan dewan-dewan perwakilan, adanya kebebasan pers, adanya persamaan hak antara wanita dan laki-laki, dan melenyapnya segala

⁹⁵ Sutan Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. *Op.cit.*, Hal. 14 dan Hal. 43

⁹⁶ *Ibid.*, Hal 43- 44

peraturan-peraturan feodal seperti sewa tanah dan hak-hak istimewa kaum priyayi.⁹⁷ Sementara, mengenai fungsi Negara Sjahrir secara praksis mengatakan bahwa jika kaum sosialis ala komunis memandang Negara semata-mata sebagai kekuasaan golongan yang berkuasa yaitu kelas borjuis dan harus diganti dengan suatu pemerintahan yang bernama diktator proletariat, maka kaum sosialis (terutama sosialisme Barat) berpendapat bahwa Negara bukanlah suatu bentuk yang tetap dengan arti dan fungsi tertentu. Negara mempunyai bentuk yang dinamis, yang sesuai dengan perkembangan serta perbandingan kekuatan-kekuatan masyarakatnya yang selalu berkembang dan berubah pula. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa corak serta fungsi Negara tergantung pada perkembangan kekuatan-kekuatan yang ada didalam masyarakat.⁹⁸

Dalam hal ini, Sjahrir mengidealkan adanya suatu bentuk Negara yang mampu menjembatani dinamika masyarakat dan mengharmonisasikan kekuatan-kekuatan yang ada didalamnya. Dengan begitu, Negara mampu menangkap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dapat berubah sewaktu-waktu dan juga mampu mencari bentuk kenegaraan yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

2. Bentuk Kepemimpinan

Dalam bentuk kepemimpinan, hal yang utama ditegaskan oleh Sjahrir bahwa pemerintah harus menganggap serta memandang dirinya sebagai pelaksana pembangunan (pelayan masyarakat). Pemerintah harus menjamin terpenuhinya kepentingan bersama. Dengan begitu, maju mundurnya kemakmuran rakyat menjadi

⁹⁷ Sutan Sjahrir. *Pikiran dan Perjuangan*. Yogyakarta. Yogyakarta. Jendela. 2000. Hal. 65-66.

⁹⁸ Sutan Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Hal 47

tanggung jawab Negara dan pemerintahannya.⁹⁹ Sjahrir mengatakan bahwa di dalam segala usaha penyusunan kepemimpinan, harus diletakkan dasar-dasar yang menjamin tidak akan terjadinya pemusatan kekuasaan dalam beberapa orang yang diberi kesempatan untuk menjadi golongan elit yaitu golongan penguasa dan feodal baru.¹⁰⁰

Dalam bentuk Negara yang demokratis, menurut Sjahrir pemimpin dipilih oleh segenap masyarakat melalui pemilihan langsung dan bukan dipilih dari perwakilan golongan-golongan tertentu saja (golongan elit penguasa atau feodal baru). Calon pemimpin dapat berasal dari manapun tanpa memandang jenis kulit (keturunan), agama, partai, dan sebagainya.

3. Bentuk Ekonomi

Dalam sistem ekonomi, Sjahrir meidealkan sistem ekonomi yang berdasarkan atas kepemilikan bersama atau sistem ekonomi sosialis (sosialisme kerakyatan), yaitu seluruh penghasilan diatur menurut keperluan masyarakat sehingga tidak mungkin lagi terjadi krisis karena persaingan.¹⁰¹ Sjahrir berkata, “sekali-kali, tidaklah boleh kepentingan segolongan kecil yang hartawan bertentangan dengan kepentingan golongan rakyat banyak yang miskin. Keadilan yang kita hendaki adalah keadilan bersama yang didasari atas kemakmuran dan kebahagiaan ”.¹⁰² keadilan bersama tersebut tentunya dijamin oleh Negara (pemerintah).

Dalam hal ini, menurut Sjahrir Negara tetap dibutuhkan bukuan malah dipinggirkan untuk tidak mengintervensi kompetisi-kompetisi yang ada didalam berbagai kehidupan rakyat. Keadilan tersebut adalah berupa kemakmuran yang

⁹⁹ *Ibid.*, Hal. 147

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hal. 109

¹⁰¹ *Ibid.*, Hal. 45

¹⁰² *Ibid.*, Hal. 136

merata. Jaminan-jaminan ini disebutkan secara detail oleh Sjahrir dalam artikelnya di jurnal *Daulat Ra'yat* pada tahun 1931-1934 dengan judul "*Barisan Persatoean Baroe*". Jaminan-jaminan tersebut dipaparkan secara rinci oleh Sjahrir pada bagian program aksi seperti terlihat sebagai berikut.¹⁰³

- a. Standar penghidupan minimum.
- b. Upah atau pendapatan elementer guna memenuhi keperluan hidup secara sederhana (ditetapkan batas upahnya dengan peraturan yang bijaksana).
- c. Pesangon (pensiun) bagi para orang tua.
- d. Dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bagi orang-orang yang penghasilannya minim karena hanya cukup dipakai untuk memenuhi kehidupan sederhana bagi keluarganya.
- e. Kerja 8 jam perhari bagi pekerja.
- f. Anak-anak di bawah 15 tahun tidak boleh menjadi buruh.
- g. Perempuan hamil tidak boleh bekerja.
- h. Ada uang pengganti ongkos berobat.
- i. Ekstra gaji bagi buruh yang mendapat kecelakaan.

Dalam rangkaian jaminan-jaminan tersebut, Sjahrir menyebut tugas-tugas Negara sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Membuat aturan pajak progresif.
- b. Membuat UU sosial tentang keselamatan kerja.
- c. Menetapkan batas upah minimum (living wage).
- d. Menghapus hukuman sanksi rodi dan segala bentuk kerja paksa.

¹⁰³ Sutan Sjahrir. *Pikiran dan Perjuangan*. Hal. 65-66.

¹⁰⁴ *Ibid.*

- e. Mengeluarkan UU anti-riba.
- f. Peraturan yang mewajibkan semua orang untuk menyekolahkan anak-anaknya dan bebas uang sekolah kepada anak-anak miskin hingga umur 15 tahun.
- g. Memerangi buta huruf lewat perguruan rakyat dan pendidikan umum.

Jaminan-jaminan ini menurut Sjahrir adalah demi penelenggaraan kekayaan dan kemampuan rakyat, diusahakan agar rakyat menjadi produktif dan tidak lagi dapat pengangguran. Persoalan lain yang dilihat Sjahrir di negeri-negeri yang dipandang menurut ukuran tingkat produksi adalah terbelakang, ialah menambah produksi dengan memulai industrialisasi.¹⁰⁵ Dalam memulai industrialisasi ini, diperlukan banyak perbaikan diberbagai bidang sehingga proses industrialisasi berjalan lancar. Guna mewujudkan hal tersebut, Sjahrir mengusulkan akan adanya usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan., yaitu:¹⁰⁶

- a. Pengupayaan modal yang terus bertambah.
- b. Disediakkannya alat produksi yang lebih baik serta lebih banyak untuk rakyat.
- c. Diperbaikinya jalan raya agar menjadi lebih baik.
- d. Pembangunan gedung-gedung sekolah dan guru-guru yang lebih baik.
- e. Dibukanya tempat-tempat dan kesempatan untuk melatih generasi muda kita agar memperoleh keahlian serta pengalaman dalam berbagai kerja.
- f. Diperbaikinya rumah sakit dan dokter serta juru rawat, poliklinik dan obat-obatnya.
- g. Perlunya memperbaiki perumahan rakyat.
- h. Menciptakan kota dan desa bersih dan sehat.

¹⁰⁵ Sutan Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Hal. 55.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hal. 238.

Untuk mencapai itu semua, Sjahrir menyebutkan beberapa hal yang dilakukan guna memenuhi pembiayaan usaha-usaha tersebut, yaitu:

1. Menggagas adanya sistem pajak

Sjahrir berpendapat bahwa sistem pajak adalah keuntungan terbesar yang diperoleh pemerintah, yang kemudian digunakan untuk meringankan kehidupan orang banyak yaitu golongan bawah.¹⁰⁷ Sjahrir memaparkan terdapat dua jenis pajak yang umumnya diketahui: pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung yakni berupa pajak pencarian, pajak penghasilan, pajak upah, pajak perseroan dan pajak perusahaan.¹⁰⁸ Sedangkan pajak tidak langsung seperti bea dan cukai atas barang-barang yang dibeli oleh rakyat, terutama barang-barang impor, juga barang dari dalam negeri atau cukai garam dan rokok dan sebagainya.¹⁰⁹

Di Negara maju, menurut Sjahrir pajak langsung merupakan pendapatan Negara yang terbesar, sedangkan pajak melalui bea masuk dan keluar perdagangan hanya merupakan pendapatan kecil.¹¹⁰ Di Indonesia, pendapatan Negara yang terutama dan terbesar adalah dari pajak tidak langsung, yakni perdagangan ke luar negeri.¹¹¹ Oleh karena merosotnya perdagangan Indonesia ke luar negeri, salah satunya akibat dari kebijakan luar negeri yang tengah mengalami krisis politik (pada waktu itu Indonesia bias mengekspor barang-barang dari Malaysia sebelum timbul krisis politik “mengganyang neo-kolonialisme Malaysia”),¹¹² maka berkurangnya pendapatan devisa Negara. Berkurangnya pendapatan devisa ini menyebabkan

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal. 58.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hal. 213.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hal. 214.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ *Ibid.*, Hal. 213.

¹¹² *Ibid.*, Hal. 213, Hal. 214, Hal. 215.

berkurangnya impor dan hal ini mengakibatkan barang yang beredar didalam negeri menjadi berkurang (yang berarti berkurang pula perdagangan didalam negeri), maka sumber-sumber penerimaan uang untuk kas Negara pun menyusut.¹¹³ Dalam hal ini, Sjahrir amat mengaharapkan kebijakan luar negeri yang benar-benar mengundang simpati dunia (yang berarti dalam kebijakan tersebut tercermin keprihatinan akan keadaan ekonomi rumah tangga indonesia).

Disamping itu, hal utama yang harus dilakukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri ini, Sjahrir berharap kepada Negara (pemerintah) untuk dapat mengendalikannya sedemikian rupa (bukan Negara malah mengundurkan (diundurkan) dirinya dari lalu lintas ini) sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, malah harus menjadi suatu alat untuk membantu usaha pembangunan ekonomi bangsa.¹¹⁴ Pemikiran mengenai pengendalian perdagangan luar negeri ini diwujudkan Sjahrir dalam bentuk dukungan saat keluarnya kebijakan pemerintah pada tanggal 26 Mei (tahunnya tidak disebutkan) mengenai peraturan-peraturan dalam 14 pasal yang terkenal. Wujud peraturan-peraturan itu terutama dalam usaha membendung inflasi.¹¹⁵ Usaha ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan pemasukan barang yang lebih banyak, sehingga jumlah barang yang beredar lebih banyak dari pada jumlah uang (banyak barang dan kurang uang). Ekspor diberi perangsang sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat cepat bertambah, dengan begitu dapat memupuk devisa supaya dapat digunakan untuk impor (dengan begitu akan menambah banyaknya barang didalam negeri). Ekspor

¹¹³ *Ibid.*, Hal. 213.

¹¹⁴ *Ibid.*, Hal. 278.

¹¹⁵ *Ibid.*, Hal. 198.

diharapkan dapat menyedot uang sebanyak mungkin dan masuk kedalam kas Negara, dengan mempertinggi semua tarif Negara dan harga barang-barang serta jasa yang diberikan oleh Negara.

- b. Dengan menghapuskan pembatasan harga-harga barang dan juga menjual devisa yang diperoleh dari hasil ekspor itu dengan harga yang jauh lebih mahal dari sebelumnya.
- c. Gaji-gaji dan upah-upah yang dibayar oleh Negara dinaikkan pula. Dengan jalan mengendalikan perdagangan secara benar, maka Negara secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sehingga dapat mengkondisikan untuk menanam modal (seperti mendirikan usaha-usaha milik negara).¹¹⁶

2. Penanaman Modal

Seperti yang telah dipaparkan diatas, Sjahrir mengatakan bahwa devisa Negara adalah dari pajak langsung dan tidak langsung terutama dari bea masuk dan keluar yang dipungut di pelabuhan-pelabuhan. Dari sini Sjahrir berpendapat bahwa pemerintah dapat memperoleh uang yang bias dipergunakan sebagai modal untuk membeli berbagai barang dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas (yang tentunya amat membantu rakyat untuk menambah penghasilannya dan juga penghasilan negara). Pembelian berbagai barang tersebut antara lain, seperti: lokomotif, kapal traktor atau pun alat-alat perbaikan jalan seperti *stoomwals*, dan sebagainya. Adapun perbaikan fasilitas yakni seperti perbaikan sekolah, jalan-jalan penghubung, pengairan persawahan, perbaikan pelabuhan, menambah tenaga listrik dengan mendirikan pusat tenaga listrik. Semua ini disebut Sjahrir sebagai modal tidak

¹¹⁶ *Ibid.*,

langsung untuk pendapatan Negara kembali.¹¹⁷ Adapun penanaman modal langsung adalah Negara mengadakan investasi pada perusahaan-perusahaan Negara.¹¹⁸

Penanaman modal langsung ataupun tidak langsung menurut Sjahrir, akan dapat berjalan lebih lancar jika diberi jaminan. Jaminan-jaminan tersebut berupa diadakannya sistem:¹¹⁹

- a. Inducement
- b. Subsidi dan proteksi
- c. Dimudahkan fasilitas kredit
- d. Dibebaskan dari bea untuk semua yang ditanam kembali sebagai modal
- e. Disediakan berbagai macam bantuan bagi siapa saja yang hendak menanam modal

3. Penghematan pemakaian dana Negara,

Sjahrir mengatakan bahwa untuk menambah modal guna mengusahakan perbaikan perekonomian lainnya adalah dengan berhemat dan menabung. Sjahrir melihat mentalitas penduduk Indonesia yang feodal dan boros. Meski miskin, menurutnya, sekali mendapat keuntungan, cepat sekali rakyat Indonesia itu untuk berfoya-foya menghamburkan uang. Dengan menabung, meskipun begitu miskin dan melarat, rakyat Indonesia harus dapat memupuk modalnya sendiri, sehingga dari penghasilan itu, tiap tahun rakyat Indonesia dapat menyisihkan apa yang diperlukan bagi penanaman modal untuk tahun-tahun ke depan dan untuk memperbaiki alat-alat yang dapat memberi penghasilan kepadanya. Itulah yang disebut Sjahrir sebagai penghematan¹²⁰ atau juga disebut akumulasi. Ia melihat

¹¹⁷ *Ibid.*, Hal. 267.

¹¹⁸ *Ibid.*, Hal. 272.

¹¹⁹ *Ibid.*, Hal. 278.

¹²⁰ *Ibid.*, Hal. 260, Lihat juga Hal. 276.

didalam dunia kapitalis, akumulasi itu berlaku dengan cara mengumpulkan keuntungan untuk memperbesar modal atau kekayaan, dan hidu seperti itu baginya sah-sah saja.¹²¹

Adapun mengenai bantuan modal asing menurut Sjahrir, memang ekonomi Indonesia tergantung pada Negara lain (sebutan Sjahrir bagi Negara lain yang dimaksudkannya ini yakni bangsa kulit putih dan kulit kuning atau kaum Ali-yan dan Ali-baba). Perekonomian Negara lebih tergantung pada pajak langsung dan tidak langsung yang diperoleh dari modal kaum kulit putih dan kuning, juga dari devisa yang dihasilkannya dari produksi dari perdagangan luar negeri. Minyak tanah, logam-logam, hasil perkebunan, semua itu merupakan sumber penghasilan Negara yang penting sekarang ini. Begitu pula, Negara tergantung pada keahlian bangsa-bangsa Ali-yan dan Ali-baba ini.¹²² Sjahrir berpendapat, modal dan keahlian bangsa-bangsa tersebut memang diperlukan, tetapi akan bermanfaat jika sudah melangkah kepada kemakmuran dan kebahagiaan.¹²³ Sjahrir kemudian menganjurkan untuk mengubah kebijakan Negara terhadap modal asing ini dengan mengurangi kebutuhan-kebutuhan pinjaman pada uang bea tersebut. Sebab lazim diketahui bahwa jika keperluan Negara pada uang kita anggap besar, maka besar pula anggapan akan kebutuhan ekspor dan devisa serta bea-bea masuk baginya. Jika keperluannya dianggap kecil (berkurang), maka berkurang pula anggapan akan kebutuhan modal asing itu untuk keperluan Negara. Negara dianjurkan oleh Sjahrir untuk tetap

¹²¹ *Ibid.*, Hal. 261.

¹²² Pengaruh mereka atas kehidupan negara inilah yang ditentang oleh orang yang menghendaki dihapuskannya kondisi ekonomi kolonial dan menuntut perekonomian nasional. *Ibid.*, Hal. 137.

¹²³ *Ibid.*, Hal. 193.

berhemat dan membangun dari modal sendiri.¹²⁴ Hal ini dianjurkan Sjahrir karena ia masih mempunyai pendapat bahwa pinjaman luar negeri ini akan menjadi pemboros bagi para pejabat atau pemimpin yang dilihatnya masih mempunyai potensi untuk boros. Dengan menganggap kebutuhan yang besar terhadap modal asing, akan terjadi ketergantungan terhadap modal asing (jadi pada persoalan anggapan bahwa seolah-olah kita membutuhkan modal dengan amat besar).

4. Perbaiki pada usaha yang sudah ada dengan memanfaatkan potensi alam yang dipunyai Indonesia

Sjahrir melihat sumber-sumber kehidupan yang lain bagi rakyat Indonesia seperti kekayaan dari hutan (semacam pengumpulan rotan, gambir, getah hutan), kekayaan laut dan perikanan darat, perindustrian dengan perburuhannya, dan perdagangan. Kesemuanya ini dapat diperbaiki dan dibuat menghasilkan kekayaan serta menambah kemakmuran rakyat.¹²⁵

5. Transmigrasi

Menurut Sjahrir, persoalan pengangguran adalah persoalan kelebihan tenaga kerja. Di pulau Jawa, Sjahrir melihat tanahnya sudah terlalu sempit atau tidak cukup untuk dapat member kehidupan bagi jumlah penduduk Indonesia yang kian meningkat. Maka ada banyak yang terpinggirkan dari tenaga kerja dipulau Jawa.¹²⁶ Tenaga tersebut menurut Sjahrir, dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga didaerah-daerah di luar Jawa yang memerlukannya.¹²⁷ Sjahrir menyebutkan pula desentralisasi pengelolaan perekonomian. Menurutnya, tiap-tiap daerah itu berbeda

¹²⁴ *Ibid.*, Hal. 248

¹²⁵ *Ibid.*, Hal. 136

¹²⁶ *Ibid.*, Hal. 252-254

¹²⁷ *Ibid.*, Hal. 136.

kebutuhan dan cara penyelenggaraannya. Maka pada persoalan penyelenggaraan perekonomian, haruslah diserahkan ketentuannya pada daerah masing-masing.¹²⁸

E. Analisis Sosialisme Kerakyatan Sjahrir

Dalam melahirkan gagasannya tentang sosialisme kerakyatan untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat baru terlepas dari segala bentuk penghisapan dan penjajahan, maka Sjahrir juga tidak dapat dilepaskan dari kekurangan dan kelebihan dalam mewujudkan cita-citanya menciptakan konsep bernegara bagi Indonesia dengan jalan sosialisme kerakyatan untuk mencapai Negara kesejahteraan. Adapun kelebihan dari pemikiran Sjahrir adalah:

1. Relevansi pemikiran Sjahrir dalam konteks perpolitikan Indonesia adalah, Sjahrir menganggap bahwa kemerdekaan nasional hanya merupakan jembatan untuk mencapai tujuan kebangsaan lainnya yaitu kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, tekanan dan penghisapan, keadilan dan pembebasan bangsa dari genggaman sisa-sisa feodalisme serta pendewasaan bangsa.
2. Pemikiran Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan lahir atas dasar konstruksi dialektis perkembangan kebangsaan yang selama berabad-abad berada dalam belenggu penjajahan asing.

Meski demikian, pemikiran Sjahrir bukan berarti tidak mempunyai kekurangan dalam mewujudkan cita-citanya dalam menciptakan suatu tatanan bernegara yang ideal yaitu Negara kesejahteraan. Adapun kekurangan dari pemikiran Sjahrir adalah:

¹²⁸ *Ibid.*,

1. Sjahrir tidak menggunakan kekuatan dengan menghimpun massa. Dalam memperjuangkan pemikirannya, Sjahrir sangat kurang berinteraksi dengan massa rakyat yang notabene golongan yang terkena dampak dari berbagai bentuk penjajahan dan penghisapan baik oleh bangsa asing maupun oleh sistem yang belum mampu membuat rakyat bebas dari berbagai bentuk penjajahan.

Terlepas dari adanya beberapa kekurangan dan kelebihan pada pemikiran Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Sjahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sangatlah besar. Pemikiran Sjahrir telah membawa harkat dan martabat bangsa dalam dunia internasional diakui sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.